SUPLEMEN

KETENTUAN BARANG KIRIMAN UMUM

PMK 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

Untuk barang kiriman secara umum perlakuan **Bea Masuk, Cukai,** dan **PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor)**-nya adalah sebagai berikut :

01 Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai berupa **Surat, Kartu Pos,** dan **Dokumen**:

a. Dibebaskan dari pengenaan bea masuk;
b. Dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan;
c. Tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

02 Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN *(consignment notes)* dengan **nilai pabean** ditetapkan **tidak melebihi harga FOB** *(Free On Board)* **USD3.00** (tiga United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan:

a. Diberikan pembebasan bea masuk;
b. Dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan;
c. Dipungut **PPN** (Pajak Pertambahan Nilai) atau **PPN dan PPnBM** (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM;
d. Dikecualikan dari pemungutan PPh (Pajak Penghasilan).

03 Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN dengan **nilai pabean** ditetapkan **melebihi FOB USD3.00** (tiga United States Dollar) **sampai dengan FOB USD 1,500.00** (seribu lima ratus United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan:

a. Klasifikasi barang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang;
b. Dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar **7,5%** (tujuh koma lima persen);
c. Dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan;
d. Nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean Barang Kiriman dengan metode nilai pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;
e. Dipungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PPN Barang dan Jasa dan PPnBM; dan
f. Dikecualikan dari pemungutan PPh.

SUPLEMEN

KETENTUAN BARANG KIRIMAN UMUM

PMK 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

04 Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN dengan **nilai pabean** ditetapkan **melebihi FOB USD3.00** (tiga United States Dollar) **sampai dengan FOB USD l,500.00** (seribu lima ratus United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan untuk **komoditas tertentu**:

a. Dikenakan bea masuk 0%/ 15%/ 25% dengan rincian:
   - Buku ilmu pengetahuan 0%
   - Jam tangan, kosmetik, besi baja 15%
   - Tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda 25%
b. Bea masuk tambahan dikecualikan;
c. PPN dipungut sesuai ketentuan PPN;
d. PPh dipungut sebesar 5%.

05 Barang kiriman **di atas USD 1500**

a. Bea Masuk dikenakan sesuai tarif MFN;
b. Dikenakan Bea masuk Tambahan;
c. PPN dipungut sesuai ketentuan PPN;
d. PPh dipungut sesuai ketentuan PPh.

Jika atas barang kiriman umum tersebut berupa BKC (Barang Kena Cukai), ketentuannya adalah sebagai berikut:

Barang Kiriman berupa barang kena cukai yang diselesaikan dengan CN atau PIBK, dapat diberikan pembebasan cukai untuk setiap Penerima Barang per kiriman dengan jumlah paling banyak:

a. sejumlah 40 (empat puluh) batang sigaret, 5 (lima) batang cerutu, 40 (em.pat puluh) gram tembakau iris, atau hasil tembakau lainnya berupa: 20 (dua puluh) batang, apabila dalam bentuk batang; (lima) kapsul, apabila dalam bentuk kapsul; 30 (tiga puluh) mililiter, apabila dalam bentuk cair; 4 (empat) cartridge, apabila dalam bentuk cartridge; atau 50 (lima puluh) gram atau 50 (lima puluh) mililiter, apabila dalam bentuk lainnya; dan/ atau
b. 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman yang mengandung etil alkohol. Dalam hal hasil tembakau lebih dari 1 (satu) jenis, pembebasan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau.

Dalam hal Barang Kiriman melebihi jumlah ketentuan, atas kelebihan barang kena cukai **dimusnahkan** oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh Penyelenggara Pos.

Syarat & Ketentuan Fasilitas Kepabeanan

Microlearning Barang Kiriman PMI

START

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti sub materi ini, diharapkan Sobat mampu memahami **ketentuan pemberian fasilitas untuk barang kiriman** yang mencakup :

- Syarat fasilitas kepabeanan
- Batasan ketentuan fasilitas kepabeanan

Sobat Pembelajar, fasilitas kepabeanan yang akan diperoleh oleh barang kiriman PMI yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

Fasilitas Kepabeanan yang akan diperoleh oleh Barang Kiriman PMI yang telah memenuhi Persyaratan

Klik gambar untuk penjelasan yaa...

1

Ketentuan khusus perlakuan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang berlaku untuk barang kiriman PMI

2

Pengecualian pemenuhan ketentuan pembatasan impor

Ketentuan khusus perlakuan BM & PDRI yang berlaku untuk barang kiriman PMI berupa :

- Pembebasan BM
- Tidak dipungut PPN
- Dikecualikan dari PPh Pasal 22

dengan ketentuan :

1) **Untuk PMI yang tercatat di Kementerian P2MI**, fasilitas kepabeanan tersebut diberikan untuk jumlah pengiriman maksimal **3x setahun** (tahun kalender dihitung berdasarkan pada tanggal pendaftaran CN) dengan **nilai setiap pengiriman maksimal @FOB USD 500.**

2) Sedangkan untuk **PMI selain yang tercatat pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (**tercatat Kemenlu), fasilitas kepabeanan tersebut diberikan untuk jumlah pengiriman maksimal **1x setahun** (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan **nilai pengiriman maksimal @FOB USD 500.**

Pengecualian pemenuhan ketentuan pembatasan impor

- Barang kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas
- Ketentuan Lartas untuk kelompok barang Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L)
- Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur K/L

2. Mendapatkan Pengecualian pemenuhan ketentuan pembatasan impor

- Barang kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas
- Ketentuan Lartas untuk kelompok barang Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L)
- Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur K/L

Barang kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas Kementerian Perdagangan yang diatur dalam Permendag nomor 36/2023 yang diperbarui terakhir dengan Permendag nomor 08/2024, yaitu **dikecualikan** dari:

a. Pemenuhan NIB (Nomor Identitas Berusaha)
b. Kondisi barang harus baru
c. Perizinan berusaha
d. Verifikasi/penelusuran teknis
e. Ketentuan pembatasan Pelabuhan tujuan

Pengecualian pemenuhan ketentuan pembatasan impor

- Barang kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas
- Ketentuan Lartas untuk kelompok barang Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L)
- Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur K/L

Untuk Perhatian . . .

Ketentuan Lartas untuk kelompok barang Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L) **tetap berlaku ya Sobat!**

Pengecualian pemenuhan ketentuan pembatasan impor

- Barang kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas
- Ketentuan Lartas untuk kelompok barang Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L)
- Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur K/L

Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur Kementrian/Lembaga lainnya **tetap berlaku**

Contoh:

a. Peraturan BPOM No. 27/2022 j.o. 28/2023 :
obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

b. Badan Karantina :
hewan,ikan dan atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan atau tumbuhan.

Kesimpulan

Lartas Impor Barang Kiriman PMI

1. Barang Kiriman PMI **dikecualikan** dari ketentuan lartas (Kemendag) sebagaimana diatur dalam Permendag 36/2023 stdtd 08/2024:
   - Pemenuhan NIB
   - Kondisi Baru-Bekas
   - Perizinan Berusaha
   - Verifikasi / Penelusuran Teknis
   - Ketentuan Pembatasan Pelabuhan Tujuan
2. Lartas untuk kelompok barang **Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L) tetap berlaku** (Pasal 34 Ayat 4)
3. Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur Kementerian/Lembaga lainnya **tetap berlaku**. Contoh:
   - PerBPOM 27/2022 jo. 28/2023 : Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
   - Badan Karantina : hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan.

Kembali ke Ketentuan umum

Dokumen Pengiriman Barang ***(Consignment Note)*** yang selanjutnya disingkat **CN** adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23

atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman kepada penerima barang.
(PMK 141/PMK.04/2023)

CN ini merupakan dokumen pemberitahuan kepabeanan yang akan dibuat oleh jasa kurir di Indonesia yang telah bekerja sama dengan ekspedisi luar negeri yang mengurusi pengiriman barang, untuk memberitahukan detil jenis barang kiriman ke Kantor Bea dan cukai secara online melalui aplikasi CEISA Barang Kiriman.

Berikut ini
Contoh *Consignment Note*

Consignment Note membantu dalam pengelolaan logistik dan inventaris.

Dengan informasi yang tercantum dalam dokumen ini, perusahaan dapat melacak pergerakan barang secara *real-time*, memastikan bahwa barang tiba tepat waktu dan dalam kondisi yang baik.

Setelah mengenal dokumen CN, yuk kita lanjutkan pembahasan mengenai fasilitas kepabeanan ya...

Bagaimana jika barang kiriman PMI melebihi batasan ketentuan fasilitas kepabeanan di atas apakah atas barang kiriman PMI tersebut tetap mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh Pasal 22?

Berikut ini adalah kemungkinan-kemungkinan kondisi barang kiriman PMI melebihi batasan ketentuan fasilitas kepabeanan barang kiriman PMI:

Jika barang kiriman PMI tersebut dikirim oleh PMI yang terdaftar di Kementerian P2MI, tetapi melebihi batas ketentuan nilai pabean per pengiriman tetapi tidak melebihi batas ketentuan jumlah pengiriman per tahun

Jika barang kiriman PMI tersebut dikirim oleh PMI yang terdaftar di Kementerian P2MI, tetapi melebihi batas ketentuan jumlah pengiriman

Bu Maira seorang PMI yang sedang bekerja di Hongkong mengirim barang ke saudaranya di Indonesia dalam bentuk barang kiriman lewat kurir PT FDX . Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

a. Bu Maira terdaftar di Kementerian P2MI
b. Nilai Pabean barang kiriman FOB USD 700
c. Berdasarkan hasil pengecekan pada sistem aplikasi CEISA Barang Kiriman, diketahui bahwa barang kiriman ini adalah kiriman ketiga yang dilakukan Bu Maira dalam 1 tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal CN.

Penyelesaian

Berdasarkan kondisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di atas, maka penyelesaian kepabeanan atas barang kiriman tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tetap mendapat fasilitas kepabeanan berupa :
   a. Pengecualian pembatasan impor
      Artinya atas barang kiriman Bu Maira tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk memenuhi perizinan yang dipersyaratkan pada ketentuan pembatasan barang impor.
   b. Pembebasan BM, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh Pasal 22 atas nilai pabean barang kiriman sebesar FOB USD 500.

2) Atas kelebihan nilai pabean barang kiriman : USD FOB 700-USD FOB 500= USD FOB 200, dikenakan BM sebesar 7,5%, PPN 11 % , dan PPH Pasal 22 sebesar 7,5%.

Penghitungan

Kembali ke Batas Ketentuan

Berikut adalah simulasi hitungannya:

Nilai pabean barang kiriman : USD FOB 200, Kurs NDPBM : 1 USD = Rp. 15.159

BM 7,5 %, PPN 11 %, PPH 7,5

FOB	: USD FOB 200
Nilai Pabean	: Rp. 15.159 x 200 = Rp. 3.031.800,00
BM	: 7,5% x Rp. 3.031.800,00 = Rp. 227.800,00 dibulatkan dalam ribuan ke atas menjadi **Rp. 228.000,00**.
Nilai Impor	: Nilai Pabean + BM = Rp. 3.031.800,00 + Rp. 228.000,00 = Rp. 3.259.800,00
PPN 11 %	: 11% x Rp. 3.259.800,00 = **Rp. 358.578,00** (Dibulatkan dalam satuan rupiah ke bawah)
PPh 7,5 %	: 7,5 % x Rp. 3.259.800,00 = **Rp. 244.425,00** (Nilai impor - Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dalam ribuan ke bawah sebelum dikalikan tarif)
Total tagihan	: **Rp. 228.000,00 + Rp. 358.578,00 + Rp. 244.425,00 = Rp. 831.003,00**

Jadi atas barang kiriman Bu Maira dikenakan BM dan PDRI dengan total tagihan **Rp. 831.003,00**.

Contoh Kasus

Pak Tong seorang PMI yang sedang bekerja di Saudi Arabia mengirim barang ke saudaranya di Indonesia dalam bentuk barang kiriman lewat kurir PT JRG.

Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :

a. Pak Tong terdaftar di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
b. Nilai Pabean barang kiriman FOB USD 400.
c. Berdasarkan hasil pengecekan pada sistem aplikasi CEISA Barang Kiriman, diketahui bahwa barang kiriman ini adalah kiriman keempat yang dilakukan Pak Tong dalam 1 tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN.

Penyelesaian

Berdasarkan kondisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di atas, maka penyelesaian kepabeanan atas barang kiriman PMI tersebut:

1) Tetap mendapat fasilitas berupa pengecualian pembatasan impor. Artinya atas barang kiriman Pak Tong tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk memenuhi perizinan yang dipersyaratkan pada ketentuan pembatasan barang impor.
2) Atas seluruh nilai pabean barang kiriman dikenakan BM sebesar 7,5%, PPN 11 % , dan PPH Pasal 22 sebesar 7,5%, serta PPnBm (jika ada).

Penghitungan

Kembali ke Batas Ketentuan

Berikut adalah simulasi hitungannya:

Nilai pabean barang kiriman : USD FOB 400, Kurs NDPBM : 1 USD = Rp. 15.159

BM 7,5 %, PPN 11 %, PPH 7,5

FOB	: USD 400
Nilai Pabean	: Rp. 15.159 x 400 = Rp. 6.063.600,00
BM	: 7,5% x Rp. 6.063.600,00 = Rp. 454.770, 00 dibulatkan dalam ribuan ke atas menjadi **Rp. 455.000,00**
Nilai Impor	: Nilai Pabean + BM = Rp. 6.063.600,00 + Rp. 455.000,00 = Rp. 6.518.600,00
PPN 11 %	: 11% x Rp. 6.518.600,00 = **Rp. 717.046,00** (dibulatkan satuan rupiah ke bawah – sudah bulat ✓)
PPh 7,5 %	: 7,5 % x Rp. 6.518.600,00 = **Rp. 488.850,00** (Nilai impor - Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ribuan ke bawah sebelum dikalikan tarif)
Total tagihan	: **Rp. 455.000 ,00 + Rp. 717.046 ,00 + Rp. 488.850,00 = Rp. 1.660.896,00**

Jadi atas barang kiriman Pak Tong dikenakan BM dan PDRI dengan total tagihan **Rp. 1.660.896,00**

IMPOR BARANG KIRIMAN PMI

PERLAKUAN BM PDRI

a. Pembebasan BM, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh, dengan ketentuan:
   - **PMI tercatat di Kementerian P2MI**: jumlah pengiriman maksimal **3x setahun @FOB USD500**
   - **PMI selain yang tercatat pada Kementerian P2MI** : jumlah pengiriman maksimal **1x setahun @FOB USD500**

b. Jika melebihi deminimis threshold: Dipungut BM 7,5% dan dipungut PDRI.

Bagaimana Jika Melebihi?

Melebihi Nilai Maksimal, tapi tidak melebihi jumlah pengiriman)

- diberikan pengecualian pembatasan impor; dan
- atas kelebihan nilai pabean dipungut bea masuk 7,5% dan PDRI.

Melebihi Jumlah Pengiriman

- diberikan pengecualian pembatasan impor; dan
- atas keseluruhan nilai pabean dipungut bea masuk 7,5% dan PDRI

Bagaimana Sobat, mudah dipahami kan? Untuk membantu memudahkan pemahaman terhadap fasilitas kepabeanan barang kiriman PMI berikut disajikan skemanya...

Contoh Penghitungan

Walaupun pengiriman ke 3 hanya USD 300, PMI bisa melakukan pengiriman ke-4 dst namun terhadap seluruh nilai barang (USD 400) dipungut bea masuk dan PDRI

Pada pengiriman ke-2, dari nilai USD700 diberikan pembebasan sebesar USD500, sehingga barang dengan nilai USD200 (700-500) dipungut BM PDRI.

Juga kami sajikan skema contoh kasus penyelesaian barang kiriman PMI yang melebihi batas ketentuan fasilitas kepabeanannya...

Mulai Mini Quiz

QUIZ!

Pak Mus seorang PMI yang sedang bekerja di Saudi Arabia mengirim barang ke saudaranya di Indonesia dalam bentuk barang kiriman lewat kurir PT JRG . Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai , barang kiriman tersebut memenuhi persyaratan sebagai barang kiriman PMI yang mendapat fasilitas kepabeanan.
Berdasarkan kondisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di atas, maka penyelesaian kepabeanan atas barang kiriman Pak Mus tersebut:

- a. Mendapatkan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan BM, tidak dipungut PPN, Dikecualikan dari PPh Pasal 22 (tanpa perlu menggunakan Surat Keterangan Bebas dari Kantor Pajak)
- b. Mendapat fasilitas berupa pengecualian pembatasan impor
- c. Jawaban a dan b benar
- d. Tidak mendapatkan fasilitas barang kiriman PMI

QUIZ!

Berikut ini adalah batas ketentuan yang harus dipenuhi oleh barang kiriman yang dikirim oleh PMI yang terdaftar di Peduli Kemenlu agar mendapatkan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan BM, tidak dipungut PPN,Dikecualikan dari PPh Pasal 22 (tanpa perlu menggunakan Surat Keterangan Bebas dari Kantor Pajak)

- Jumlah pengiriman maksimal 1x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD 500
- Jumlah pengiriman maksimal 3x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD 500
- Jumlah pengiriman maksimal 3 x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD 100
- Jumlah pengiriman maksimal 1 x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tan pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD 200

QUIZ!

Berikut ini adalah batas ketentuan yang harus dipenuhi oleh barang kiriman yang dikirim oleh PMI yang terdaftar Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar mendapatkan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan BM, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh Psl 22 (tanpa perlu menggunakan Surat Keterangan Bebas dari Kantor Pajak)

- Jumlah pengiriman maksimal 1x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD 500
- Jumlah pengiriman maksimal 1 x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD200
- Jumlah pengiriman maksimal 3 x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD 100
- Jumlah pengiriman maksimal 3x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD 500

Yeayy..Sobat telah berhasil menyelesaikan mini kuis di materi ini..lanjut yuukk!!

Wah, sobat pembelajar tentunya sudah lebih paham mengenai materi melalui mini quiz tadi ya ...
JANE
PBC

- PMK 141/PMK.04/2023, mengatur bahwa yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pembayaran BM dan/atau PDRI adalah **Penerima Barang selaku Importir.**
- Jika penerima barang tidak ditemukan maka yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran tagihan tersebut adalah Penyelenggara Pos yang bertindak sebagai PPJK dalam pengurusan impor Barang Kiriman.
- Pengurusan impor Barang Kiriman PMI oleh PPJK tidak diperlukan surat kuasa.

IMPOR BARANG KIRIMAN PMI

3. TANGGUNG JAWAB

a. Penerima barang merupakan importir, bertanggung jawab atas BM dan PDRI
b. Penyelenggaran Pos sebagai PPJK, bertanggung jawab atas BM dan PDRI jika penerima barang tidak ditemukan.

BM: Bea Masuk; PDRI: Pajak Dalam Rangka Impor

Penerima Barang

Penyelenggara Pos

Setelah Sobat memahami penanggung jawab pembayaran tagihan BM dan PDRI atas barang kiriman PMI, selanjutnya kami akan membersamai Sobat Pemelajar untuk mengetahui siapakah yang dimaksud **penyelenggara Pos** tersebut?

Penerima Barang | Penyelenggaraan Pos

Penerima Barang merupakan importir, bertanggung jawab atas BM dan PDRI

Penerima Barang | Penyelenggara Pos

Ketika sobat akan mengirim barang kiriman dari luar negeri sobat PMI harus menghubungi jasa kiriman atau ekspidisi yang akan mengurus pengiriman barang. **Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos yang meliputi PT POS Indonesia dan Perusahaan Jasa Titipan.**

- Pastikan ya sobat ketika akan mengirim barang pilihlah ekspedisi atau penyelenggara Pos di LN yang memiliki perjanjian kerja sama dengan ekspedisi/kurir yang ada di Indonesia.
- Karena ketika barang kiriman itu sampai di Indonesia, ekspedisi/kurirlah yang akan mengurus penyelesaian kewajiban pabean di Kantor Bea dan Cukai (menyampaikan bukti kerja sama dengan ekspedisi di LN ke Kantor Bea dan Cukai).

Caranya, Sobat Pembelajar bisa melihat tabel nama-nama agen luar negeri yang telah tervalidasi telah memiliki kerjasama dengan ekspedisi di Indonesia, oleh pejabat Bea dan Cukai di KPPBC Tanjung Mas dan KPPBC Tanjung Perak di tombol 'cek daftar'

Nah...sekarang bagaimana ya caranya agar Sobat Pembelajar dapat mengetahui bahwa ekspedisi tersebut telah memiliki bukti Kerjasama dengan ekspedisi/kurir di Indonesia?

Sobat Pembelajar, daftar nama-nama agen sebelumnya juga dapat dilihat di akun instagram resmi KPPBC Tanjung Mas dan KPPBC Tanjung Perak.

Daftar tersebut akan secara berkala akan diperbarui oleh pejabat Bea dan Cukai yang terkait.

Instagram Bea Cukai Tanjung Emas

Instagram Bea Cukai Tanjung Perak

Download

Ini adalah bagian akhir sub materi yang kedua nih Sobat Pemelajar!!
Kita akan lanjutkan pada sub materi yang selanjutnya yang akan membahas mengenai **alur penyelesaian kewajiban pabean atas Impor Barang Kiriman PMI**

Alur Penyelesaian Kewajiban Pabean

(atas Impor Barang Kiriman PMI)

Microlearning Barang Kiriman PMI

START

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti materi ini, diharapkan Sobat mampu memahami **alur penyelesaian kewajiban pabean atas Impor Barang Kiriman PMI** yang mencakup :

- skema alur pengiriman barang beserta tahapannya

Sobat Pembelajar, tiba waktunya kita membahas mengenai alur penyelesaian kewajiban pabean atas impor barang kiriman PMI mulai dari pengiriman barang kiriman PMI dari luar negeri sampai barang tersebut diterima oleh penerima barang...sudah siapkah Jane?
berarti termasuk mengenai skema alur pengiriman barang kiriman PMI ya Tirta, wah Jane ingin tahu lebih lanjut ...

Sobat Pembelajar, kali ini kita akan membahas mengenai skema alur pengiriman barang kiriman PMI dari luar negeri tempat sobat bekerja sampai ke penerima barang ...

1 Sobat Pemelajar, ketika sobat akan berkirim barang tentunya Sobat akan mencari agen di luar negeri tempat sobat bekerja. Masih ingatkan tips mencari agen di luar negeri, Sobat?

2 Setelah mendapatkan agen di luar negeri, Sobat PMI akan menyerahkan barang kiriman dan menyampaikan detil uraian jenis, jumlah dan harga barang kiriman tersebut kepada agen di luar negeri. Setelah itu agen di luar negeri akan menghubungi kurir di luar negeri untuk mengirim barang kiriman tersebut ke Indonesia.

3 Kurir di luar negeri mengirimkan barang kiriman tersebut ke Indonesia

4 Setiba di Indonesia barang kiriman tersebut dibongkar oleh pengangkut dan ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yaitu gudang milik pihak swasta di kawasan pabean yang diawasi oleh Petugas Bea dan Cukai, yang digunakan untuk menimbun barang impor dan barang ekspor menunggu penyelesaian kewajiban pabeannya.

5 Setelah ditimbun di TPS, PJT (ekspedisi di Indonesia) membuat CN untuk barang kiriman PMI yang diimpor dengan tujuan untuk dipakai di Indonesia melalui modul aplikasi CN, dan dikirim ke Sistem Komputer Kepabeanan (SKP) DJBC yaitu CEISA Barang Kiriman

6 CEISA Barang Kiriman melakukan penelitian atas CN terkait dengan pemenuhan ketentuan mengenai :

a) Validasi / penelitian identitas PMI, apakah terdaftar pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau pada Kemenlu, melalui sistem terintegrasi.

b) Jumlah pengiriman barang dalam 1 tahun kalender. (Jika CEISA Barang Kiriman mengalami gangguan, penelitian dilakukan secara manual oleh pejabat Bea dan Cukai)

c) Jika hasil penelitian kedapatan Pengirim barang bukan PMI, atau melebihi jumlah maksimal pengiriman, barang direekspor atau diselesaikan dengan ketentuan barang kiriman umum

IMPOR BARANG KIRIMAN PMI

6 PEMBERITAHUAN PABEAN

a. Barang kiriman PMI diberitahukan dengan CN yang disampaikan melalui SKP.

b. SKP meneliti:

   1) Validasi identitas PMI, apakah terdaftar pada BP2MI atau Kemlu (integrasi sistem).

   2) Jumlah pengiriman barang dalam 1 tahun kalender.

   (Jika SKP mengalami gangguan, penelitian dilakukan manual oleh Pejabat BC)

c. Jika hasil penelitian kedapatan:

   1) pengirim barang bukan PMI, atau

   2) melebihi jumlah maksimal pengiriman,

   barang direekspor atau diselesaikan dengan ketentuan barang kiriman umum.

Barang Kiriman PMI yang telah disampaikan CN, dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Berdasarkan hasil manajemen risiko atas barang Kiriman PMI, dapat dilakukan :

1

Pemeriksaan barang dengan cara dipindai dengan menggunakan alat pemindai elektronik (X-ray)

2

Pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman

2

Pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman

Pemeriksaan fisik barang ini dilakukan dalam hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemindaian dan/atau informasi lainnya terdapat indikasi barang tidak sesuai dengan uraian yang tercantum di dalam dokumen CN dan/atau tidak memenuhi larangan/pembatasan

Uraian jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai pabean yang tercantum dalam dokumen CN tidak jelas atau tidak tercantum dalam dokumen pelengkap lainnya yang menyertai Barang Kiriman tersebut

Berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean/direktur yang mempunyai tugas evaluasi dan pelaksanaan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai atas barang PMI tsb harus dilakukan pemeriksaan fisik.

Bagaimana **mekanisme pemeriksaan fisik** barang kiriman PMI yang dilaksanakan oleh pejabat Bea dan Cukai?

1 PJT/Petugas POS membuka kemasan barang kiriman PMI yang akan diperiksa dan menyiapkan barang kiriman PMI tersebut untuk diperiksa oleh pejabat Bea dan Cukai.

2 Pejabat Bea dan Cukai disaksikan oleh petugas Penyelenggara Pos (PJT atau Petugas Pos) memeriksa fisik barang kiriman PMI yang telah disediakan oleh PJT/Petugas POS.

3 Setelah selesai dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat Bea dan Cukai, PJT / Petugas POS menutup kembali kemasan barang kiriman PMI tersebut.

4 Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda khusus pada kemasan Barang Kiriman PMI yang telah selesai diperiksa tersebut.

5 Pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik bersama dengan Penyelenggara POS (PJT/Petugas POS)

6 Pejabat Bea dan Cukai mengisi laporan hasil pemeriksaan di kolom yang tersedia pada dokumen CN

Berdasarkan hasil penelitian dokumen yang dilakukan oleh SKP dan atau pejabat Bea dan Cukai serta hasil pemeriksaan fisik barang

Pejabat Bea dan Cukai dapat **meminta informasi tambahan** kepada pengirim dan/ atau Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos (PJT/Petugas PT POS Indonesia) dalam rangka penelitian dokumen dengan **menerbitkan Nota Permintaan Dokumen** (NPD)

- PJT/ Petugas PT POS Indonesia harus memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu paling lama **7 (tujuh) hari kerja** setelah tanggal permintaan informasi, dalam hal informasi disampaikan oleh Petugas PT POS Indonesia atau **5 (lima) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi**, dalam hal informasi disampaikan oleh PJT.
- Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP menetapkan tarif dan nilai pabean berdasarkan informasi yang tersedia dalam hal permintaan informasi tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut.

IMPOR BARANG KIRIMAN PMI

6 PEMERIKSAAN PABEAN

a. Barang Kiriman PMI dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasar manajemen risiko.
b. Dalam rangka penerapan manajemen risiko, barang dipindai dengan Xray.
c. Pemeriksaan pabean meliputi pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.
d. Pemeriksaan fisik dilakukan jika:
   1) berdasarkan x-ray perlu diperiksa fisik;
   2) uraian barang dalam CN tidak jelas;
   3) ditetapkan risk engine.
e. Penyiapan barang oleh PJT, Pemeriksaan fisik oleh BC dengan disaksikan oleh PJT
f. Untuk keperluan penelitan dokumen, diterbitkan NPD (PJT harus merespon maksimal 5 hari). Jika tidak dipenuhi, penetapan tarif dan nilai pabean dilakukan berdasarkan informasi yang ada.

6 PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN

a. Penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbikan SPPBMCP.
b. Jika nilai pabean ditetapkan melebihi deminimis (FOB USD500), atas kelebihan nilai pabean, termasuk seluruh biaya pengangkutan/pengiriman dan asuransi, dikenakan bea masuk dan PDRI.

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman dan/ atau SKP berdasarkan hasil pemeriksaan pabean :

1

Memberitahukan kepada Penerima Barang melalui PJT/Petugas PT POS Indonesia untuk menyampaikan dokumen pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, dalam hal Barang Kiriman PMI terkena ketentuan larangan dan/ atau pembatasan dan belum dipenuhi.

Penelitian atas pemenuhan ketentuan larangan dan/ atau pembatasan dilakukan oleh:

a. Pejabat Bea dan Cukai.

b. SKP; dan/atau

c. Sistem Indonesia National Single Window (SINSW)

Penerima Barang berkewajiban memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan tersebut

2

Melakukan penetapan tarif dan nilai pabean, dalam hal Barang Kiriman:

a) Tidak terkena ketentuan larangan dan/ atau pembatasan.

b) Telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman dan/ atau SKP berdasarkan hasil pemeriksaan pabean :

- Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP DJBC (CEISA Barang Kiriman) menetapkan tarif dan nilai pabean serta pemenuhan ketentuan larangan pembatasan berdasarkan pemeriksaan pabean (penelitian dokumen dan atau pemeriksaan fisik barang) yang telah dilakukannya.
- **Penetapan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari** sejak tanggal pendaftaran CN.

Hasil Pemeriksaan Pabean

01

Jika barang kiriman PMI tersebut **memenuhi persyaratan** untuk mendapat fasilitas kepabeanan impor barang kiriman PMI, maka atas barang kiriman PMI tersebut

akan mendapatkan **fasilitas impor** barang kiriman PMI seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, yang meliputi **fasilitas tarif, nilai pabean, jumlah pengiriman dan ketentuan pembatasan impor.**

Hasil Pemeriksaan Pabean

02

Apabila jenis barang kiriman PMI tersebut ternyata dikirim oleh pengirim yang bukan berstatus sebagai PMI yang terdaftar di Kementerian PPMI atau Peduli Kemenlu dan atau atas barang kiriman PMI tersebut **melebihi batas ketentuan** fasilitas kepabeanan berupa melebihi quota jumlah pengiriman pertahun

maka atas barang kiriman PMI tersebut akan **diberlakukan sebagai barang kiriman umum** sesuai ketentuan barang kiriman PMK 96/PMK.04/2023 atau direekspor

7 SPPBMCP adalah Surat penetapan terkait tarif dan/ atau nilai pabean atas barang impor serta pungutan bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi

SPPBMCP

Apa itu SPPBMCP?

SPPBMCP adalah Surat penetapan terkait tarif dan/ atau nilai pabean atas barang impor serta pungutan bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi.

Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice, packing list, bill of lading/ airway bill,* dokumen identifikasi barang, dokumen. pemenuhan persyaratan impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

- SPPBMCP menjadi dokumen dasar pembayaran BM, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau PDRI dan disampaikan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara POS (PJT/Petugas PT POS Indonesia).
- SPPBMCP yang telah dilunasi berfungsi sebagai persetujuan pengeluaran barang.

Kembali ke Skema

8 Jika berdasarkan pemeriksaan pabean Pejabat Bea dan Cukai tidak terdapat tagihan BM dan PDRI atau jika ada perijinan dan/atau SPPBMCP telah terpenuhi maka atas barang kiriman PMI tersebut akan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh pejabat Bea dan Cukai.

9

PJT membawa barang tersebut ke gudang PJT untuk disortir

10

PJT menyerahkan barang tersebut ke kurir untuk mengantarkan barang tersebut ke penerima barang

Mulai Mini Quiz

Quiz 1

Bu Ema seorang PMI yang bekerja di Kuwait, mengirim barang kiriman PMI ke saudaranya di Indonesia bernama Claudi melalui ekspedisi PT. GMH.

Setelah barang sampai ke Indonesia, penyelesaian kepabeanannya diurus oleh agen/PJT PT. ZET yang telah bekerjasama dengan PT GMH. Berdasarkan CN yang dikirim oleh PT ZET, pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean lebih dari yang diberitahukan dituangkan di SPPBMCP yang menyebabkan tagihan BM dan PDRI sebesar Rp. 950.000,00.

Berdasarkan kondisi tersebut, siapakah penanggung jawab pembayaran SPPBMCP?

- Kementerian P2MI
- PT. GMH
- Claudi
- Bu Ema

Quiz 2

Berdasarkan kondisi seperti nomor 1, ternyata terhadap barang kiriman tersebut dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat Bea dan Cukai.
Siapakah yang berwenang membuka kemasan dan menyiapkan barang kiriman untuk diperiksa pejabat Bea dan Cukai?

- Pejabat Bea dan Cukai
- Claudi
- PT. POS Indonesia
- Agen PT. ZET

Quiz 3

Berdasarkan kondisi seperti nomor 1, menunggu penyelesaian kepabeanan di Indonesia, barang kiriman tersebut ditimbun di . . .

- TPS
- TPB
- Gudang Pabean
- TTP

Quiz 4

Biaya penimbunan barang di TPS, dibayarkan ke . . .

- Pejabat Bea dan Cukai
- Kantor Pabean
- Pihak Swasta Pemilik TPS
- PT. GMH

Quiz 5

Jika ternyata terbukti bahwa Bu Ema belum terdaftar di Kementerian P2MI maupun Peduli Kemenlu, maka atas barang kiriman Bu Ema tersebut ...

- Dapat memperoleh fasilitas kepabeanan barang kiriman PMI
- Dimusnahkan
- Disita untuk negara
- Tidak dapat memperoleh fasilitas kepabeanan barang kiriman PMI

Quiz 6

Jika ternyata terbukti bahwa Bu Ema belum terdaftar di Kementerian P2MI maupun Peduli Kemenlu, maka atas barang kiriman Bu Ema tersebut dapat diselesaikan dengan cara . . .

- Direimpor
- Dimusnahkan
- Dihibahkan
- Diselesaikan dengan ketentuan barang kiriman pada umumnya yang terdapat di PMK 96 PMK.04/2023 atau dikirim Kembali ke Bu Ema di Kuwait.

Yeay...Sobat telah menyelesaikan
mini quiz pada sesi materi ini

Jane....setelah mengetahui bagaimana skema pengiriman barang kiriman PMI, kepada sobat penting juga untuk kita sampaikan pembahasan mengenai bagaimana cara tracking posisi barang kirimannya, serta tagihannya yang tercantum di SPPBMCP jika ada.

Yaps setuju banget Tirta, yuk kita lanjut mempelajari bersama terkait *tracking* barang kiriman yaa,..

Tracking Barang Kiriman

- Ketika mengirim barang kiriman ingin tahu sampai dimana barang kiriman tersebut?
- Berapa lama waktu penyelesaian kepabeanan atas barang kiriman tersebut?
- Apa saja Fase-fase penyelesaian kepabeanan yang harus dilalui oleh barang kiriman tersebut? Berapa lama waktu penyelesaiannya?

Sobat pernahkah bertanya-tanya terkait hal ini saat mengirim barang kiriman?

Bagaimana Caranya Tracking Barang Kiriman???

1. Untuk dapat melakukan tracking ini, sobat harus meng-klik laman **http://www.beacukai.go.id/barangkiriman**
2. Selanjutnya masukkan nomor *Airway Bill* (AWB) atau nomor resi pengiriman.
3. Setelah itu pilih menu informasi sesuai kebutuhan sobat PMI.

Tentu saja info tentang barang kiriman yang dituju akan tersedia jika CN atas barang kiriman tersebut telah dikirim ke SKP ya sobat...

Tracking barang milik agen/ekspedisi di luar negeri itu untuk **memberitahu posisi barang dari mulai diterima agen sampai barang tiba di Indonesia.**

Tracking milik Bea dan Cukai itu untuk mengetahui **posisi barang di Indonesia** mulai CN dikirim ke SKP (CEISA Barang Kiriman) sampai pengeluaran barang, juga detil tagihan pada SPPBMCP jika ada.

Apa bedanya tracking barang kiriman milik ekspedisi atau agen dengan tracking milik Bea dan Cukai?

TRACKING

TAGIHAN BILLING	
KODE BILLING	620230300275321 | NTPN:A4AE41E1IT1O14JP
TOTAL BILLING	Billing Konsol : 31,721,000
412111 - Bea Masuk	24,000
411123 - Pajak Penghasilan	0
411212 - Pajak Pertambahan Nilai	37,000
411222 - Pajak Penjualan Barang Mewah	0
412123 - Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0

Gambar ini adalah contoh tracking rincian biaya tagihan SPPBMCP
Ini adalah bagian akhir materi yang ketiga nih Sobat Pemelajar!! Kita akan lanjutkan pada materi yang selanjutnya yang akan membahas mengenai **studi kasus** yaaa....

Impor Barang Pekerja Migran Indonesia (PMI)

#BEYONDBOUNDARIES

Pekerja Migran Indonesia

Barang Impor

UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006

Setiap barang yang berasal dari luar negeri, kemudian dimasukkan ke Indonesia itu disebut **barang impor** dan **terutang Bea Masuk**

PMK 141/PMK.04/2023

Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Fasilitas Impor Barang PMI

#BEYONDBOUNDARIES

Microlearning Impor Barang Kiriman PMI

3
Microlearning

01

Microlearning Barang Kiriman PMI

02

Microlearning Barang Bawaan Penumpang PMI

03

Microlearning Barang Pindahan PMI

#BEYONDBOUNDARIES

Microlearning Impor Barang Kiriman PMI

01

Microlearning
Barang Kiriman PMI

#BEYONDBOUNDARIES

PERSYARATAN BARANG KIRIMAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

#BEYONDBOUNDARIES

Pekerja Migran Indonesia (PMI)

PMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

PMI yang berhak atas fasilitas impor:

- PMI yang tercatat pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
- PMI yang tidak tercatat pada Kementerian PPMI, tapi memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.

Barang Kiriman PMI

Barang kiriman PMI adalah Barang milik PMI yang masih bekerja dan berdomisili di luar negeri dan dikirimkan menggunakan Jasa Pos atau Perusahaan Jasa Titipan (PJT) untuk keluarganya di Indonesia.

Syarat :

01 Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia

02 Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi

03 Bukan Barang Kena Cukai (BKC)

04 Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet

05 Tidak untuk diperdagangkan

Barang Kiriman PMI

01 Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia

02 Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi

03 Bukan Barang Kena Cukai (BKC)

04 Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet

05 Tidak untuk diperdagangkan

- Pakaian jadi dan aksesori
- Barang tekstil sudah jadi lainnya
- Barang elektronik, tidak termasuk telepon seluler, komputer genggam (handheld) dan komputer tablet
- Alas kaki
- Kosmetik dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- Mainan anak
- Tas
- Makanan dan minuman tidak termasuk minuman mengandung etil alkohol
- Perlengkapan rumah tangga
- Perlengkapan sekolah

Barang Kiriman PMI

01 Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia

02 Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi

03 Bukan Barang Kena Cukai (BKC)

04 Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet

05 Tidak untuk diperdagangkan

Sigaret

Cerutu

Tembakau iris/ produk hasil tembakau lainnya

Minuman mengandung etil alkohol

Etil alkohol

#BEYONDBOUNDARIES

Barang Kiriman PMI

01
Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia

02
Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi

03
Bukan Barang Kena Cukai (BKC)

04
Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet

05
Tidak untuk diperdagangkan

Handphone

Komputer genggam

Tablet

Barang Kiriman PMI

01 Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia

02 Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi

03 Bukan Barang Kena Cukai (BKC)

04 Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet

05 Tidak untuk diperdagangkan

Barang dagangan adalah barang yang dikirim oleh PMI dengan tujuan untuk dijual di Indonesia dengan ciri jumlah dan/atau jenisnya tidak layak untuk kepentingan pribadi

Contoh:

Jumlahnya tidak layak untuk kepentingan pribadi

Penjepit rambut **5 lusin**

Jenisnya tidak layak untuk kepentingan pribadi

Sparepart gear mobil kondisi baru 1 set

Jumlah dan Jenisnya tidak layak untuk kepentingan pribadi

Baut 2 lusin

Barang Kiriman PMI

Ukuran Kemasan

- Panjang : maksimal **60cm**
- Lebar : maksimal **60cm**
- Tinggi : maksimal **80cm**

Penyelesaian Barang Kiriman PMI

Bagaimana jika barang kiriman tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan?

Penyelesaian Barang Kiriman PMI

PMI tidak terdaftar di Kementerian PPMI atau Kementerian Luar Negeri

Melebihi jumlah pengiriman yang ditentukan (maksimal 3 kali setahun untuk yang terdaftar di KP2MI, maksimal 1 kali setahun untuk yang terdaftar di Kemenlu)

Barang Kiriman berupa handphone, komputer genggam dan/atau tablet

Reekspor

Diselesaikan dengan ketentuan impor barang kiriman umum

Penyelesaian Barang Kiriman PMI

Barang Kiriman bukan merupakan barang keperluan rumah tangga atau barang konsumsi

misalnya tas branded atau barang bernilai tinggi lainnya *(high value goods)*

Barang untuk diperdagangkan

Diselesaikan dengan ketentuan impor barang kiriman umum

Penyelesaian Barang Kiriman PMI

Barang Kiriman melebihi batasan ukuran
60 x 60x 80 cm

Diperiksa fisik barang

Diselesaikan dengan ketentuan impor barang kiriman umum

Penyelesaian Barang Kiriman PMI

Barang Kiriman berupa Narkotika, Psikotropika dan Prekusor

Ditegah (ditahan) untuk diselesaikan sesuai peraturan perundangan yang terkait

Selamat

Sobat telah menyelesaikan materi tentang Persyaratan Barang Kiriman PMI

Penyusun Materi Pembelajaran : Rita Dwi Lindawati
Penyusun Media Pembelajaran : Bimo Adi

Untuk ketentuan barang kiriman umum silakan diakses pada materi suplemen setelah ini ya.

NEW SPIRIT ZI-WBBM PBC

Studi Kasus
Barang Kiriman PMI

Microlearning Barang Kiriman PMI

PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

Soal
Studi Kasus 1

Pak Udin bekerja sebagai konsultan keuangan di Negara Kuwait sejak 3 tahun yg lalu.

Pak Udin telah mendaftarkan sebagai pekerja migran Indonesia ke Kedubes Kuwait di bulan pertama dia bekerja di Kuwait. Pada Bulan Agustus 2024, Pak Udin mengirimkan barang pertama kali untuk adiknya (Sumiyati memiliki NPWP yg akan menikah) berupa keperluan pernikahan sebagai berikut :

- 2 pcs sprei ukuran 180x200 cm harga @10 Dinar Kuwait (KWD)
- 2 pcs gamis wanita @ 7.5 KWD
- 1 kalung emas 22 Karat 15 gr, 10 KWD/gr

Ukuran kemasan : kurang dari 60 x 60 x 80 cm

Barang dikirimkan dengan agen perusahaan jasa titipan ABC Cargo. Tiba di Semarang tanggal 12 Agustus 2024. Dilaporkan ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Emas dengan *Consigment Note* (CN) pada tanggal 15 Agustus 2024

Kurs tanggal 15/8/2024 1 KWD = Rp 50.500,00

1 USD = Rp 16.000,00

Ongkir paket tersebut adalah 10 KWD

Hitunglah BM, dan Pajak dalam rangka impor dari importasi Pak Udin ?

Jawaban Soal Studi Kasus 1

Hasil analisis terhadap informasi barang kiriman PMI :

a. Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar negeri dan yang bersangkutan sudah terdaftar di Kedubes Quwait (Kemenlu).
b. Barang kiriman PMI untuk keperluan rumah tangga dan/atau barang konsumsi.
c. Bukan merupakan Barang Kena Cukai (BKC)
d. Bukan merupakan telepon seluler, komputer genggam, dan/ atau komputer tablet; dan
e. Bukan barang untuk diperdagangkan.
f. Kemasan Barang Kiriman PMI memenuhi ketentuan kurang dari ukuran 60 x 60 x 80 cm.

Berarti atas barang kiriman PMI tersebut berhak mendapat fasilitas impor barang kiriman PMI yaitu :

1. Dikecualikan dari perijinan impor Kemendag.
2. Pembebasan BM dan PDRI untuk maksimal FOB USD 500
3. Maksimal pengiriman satu kali dalam satu tahun kalender.

Adapun Hitungannya adalah sebagai berikut :

Sobat, Hasil pemeriksaan pabean pejabat Bea dan Cukai menyatakan bahwa :

- 2 pcs sprei ukuran 180x200 cm harga @10 Dinar Kuwait (KWD) = KWD 20, HS Code : 6302.21.00 tarif BM 25% PPh 7.5%, PPN 11%.
- 2 pcs gamis pernikahan @ KWD 7.5 = KWD 15, HS Code 6203.42.10 tarif 25%, PPh 7,5%, PPN 11%
- 1 kalung emas 22 Karat 15 gr, 10 KWD/gr = KWD 150, HS Code 7113.19.90 tarif 15%, PPh 7,5% PPN 11%

Total Nilai barang kiriman PMI adalah FOB = KWD 20 + KWD15 + KWD150 = KWD185

Rp 9.342.500 = USD 583,9063

Pembebasan BM dan PDRI sebagai Pekerja Migran Indonesia maksimum: FOB USD 500

Nilai yang dikenakan BM = USD 583.9063 – USD 500 = USD 83,9063

Adapun Lanjutan Hitungannya adalah sebagai berikut :

Nilai Pabean : C x I x F

(C= USD 83,9063, Freight = 10 KWD = USD 31,5625 Insurance = USD 0,5773)

Nilai Pabean (NP) = USD 116,0461 x Rp16.000,00

= Rp1.856.738,00

BM barang kiriman = 7,5% x Rp. 1.856.738,00 = Rp. 139.255, 35

(7,5%) pembuatan ke atas dalam ribuan rupiah menjadi Rp. 140.000,00 sesuai PMK 141/2023

Nilai Impor = NP+BM

= Rp1.856.738,00 + Rp140.000,00 = Rp1.996.738,00

PPN (11%) = tarif x NI = 11% x Rp1.996.738,00

= Rp219.641,00 (pembulatan dalam satuan rupiah ke bawah)

PPh (7,5%) = tarif x NI = 7,5% x Rp1.996.000,00

(pembulatan nilai impor (penghasilan kena pajak) dalam ribuan rupiah ke bawah sebelum dikalikan tarif)

= Rp. 149.700,00

(Tarif PPh item 1-3 sama yaitu 7,5% atau 2 kali lipat jika tidak memiliki NPWP)

Soal
Studi Kasus 2

Sdr. Mimi seorang pekerja konstruksi di Jepang yang telah terdaftar di Kementerian P2MI mengirimkan barang ke Bapak Mamin yang tidak memiliki NPWP di Cirebon sepanjang tahun 2024 sebanyak 3 kali melalui PJT ZYZ yang diselesaikan dengan CN PMI, diberitahukan melalui daftar sebagaimana disamping berikut:

PJT ZYZ terdaftar di KPPBC Tanjung Emas. Barang kiriman Mimi diberitahukan di KPPBC Tanjung Emas.

Bagaimana penetapan atas impor barang kiriman Sdr. Mimi pekerja migran Indonesia?

Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024
1 pcs, Buku Pelajaran USD 5 2 pcs, Panci Alumunium, @USD10 1 pcs Sepeda Anak, USD100 1 pcs laptop USD300 Total = USD 425	1 Unit Smartphone, USD 350 1 Box Snack, USD 10 5 pcs *Women Dress* @USD 20 Total = USD 460	1 Unit Sepeda Motor Listrik, USD 500 5 pcs Children Pant @USD 10 4 Pcs Mens Skirt @USD 25 1 Pcs Baby Stroller USD 75 Total = USD 675
Kurs USD= Rp. 15.900	Kurs USD= Rp. 16.000	Kurs USD= Rp. 16.100

Jawaban Soal
Studi Kasus 2

Hasil analisis informasi barang kiriman PMI :

A

Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar negeri dan yang bersangkutan sudah terdaftar di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (sebelumnya BP2MI).

B

Jenis Barang

b.1.) Barang Kiriman bulan Juni 2024

- Terdapat 1 buah laptop dan barang kiriman PMI untuk keperluan rumah tangga dan/atau barang konsumsi.
- Bukan merupakan Barang Kena Cukai (BKC)
- Bukan barang untuk diperdagangkan.
- Kemasan Barang Kiriman PMI memenuhi ketentuan kurang dari ukuran 60 x 60 x 80 cm
- Nilai barang kiriman FOB USD = USD 5 + USD 10 + USD 100 + USD 300 = USD 425.

Jenis Barang

b.2.) Barang Kiriman bulan Juli 2024

- Terdapat barang jenis smartphone dan barang kiriman PMI untuk keperluan rumah tangga dan/atau barang konsumsi.
- Bukan merupakan Barang Kena Cukai (BKC)
- Bukan barang untuk diperdagangkan.
- Kemasan Barang Kiriman PMI memenuhi ketentuan kurang dari ukuran 60 x 60 x 80 cm
- Nilai barang kiriman FOB USD = USD 350 + USD 10 + USD 100 = USD 460

Jawaban Soal
Studi Kasus 2

Jenis Barang

B

b.3.) Barang Kiriman bulan Agustus 2024

- Terdapat barang jenis sepeda motor listrik dan barang kiriman PMI untuk keperluan rumah tangga dan/atau barang konsumsi.
- Bukan merupakan Barang Kena Cukai (BKC)
- Bukan merupakan telepon seluler, komputer genggam, dan/atau komputer tablet; dan
- Bukan barang untuk diperdagangkan.
- Kemasan Barang Kiriman PMI memenuhi ketentuan kurang dari ukuran 60 x 60 x 80 cm
- Nilai barang kiriman FOB USD = USD 500 + USD 50 + USD 100 + USD 75 = USD 725

Penyelesaian
Studi Kasus 2

Barang kiriman PMI bulan Juni 2024

Jika diberitahukan sebagai barang kiriman PMI dengan CN PMI, atas 1 buah laptop dan barang lainnya masih dapat digolongkan barang keperluan konsumsi dan atau keperluan rumah tangga. Total nilai barang-barang tersebut adalah USD 425 tidak melebihi batas maksimal ketentuan nilai barang per pengiriman yaitu FOB USD 500.

Berdasarkan kondisi tersebut atas impor barang kiriman PMI dapat diajukan pengeluaran barang dengan mendapatkan pembebasan BM dan PDRI. Selain itu juga akan mendapatkan pengecualian pemenuhan perizinan ketentuan pembatasan impor.

Penyelesaian
Studi Kasus 2

Barang kiriman PMI bulan Juli 2024

Jika diberitahukan sebagai barang kiriman PMI dengan CN PMI, atas 1 buah *Smartphone*, diterbitkan Surat Pemberitahuan Barang Larangan (SPBL) dan atas barang tersebut ditegah.

Barang yang tidak ditetapkan SPBL dapat diajukan pengeluaran barang sebagian dengan mendapatkan pembebasan BM dan PDRI karena nilai barangnya USD 110 tidak melebihi batas maksimal ketentuan nilai barang per pengiriman yaitu FOB USD 500.

Selain itu juga akan mendapatkan pengecualian pemenuhan perizinan ketentuan pembatasan impor.

Penyelesaian
Studi Kasus 2

Barang kiriman PMI bulan Agustus 2024

Jika diberitahukan sebagai barang kiriman PMI dengan CN PMI, atas 1 buah sepeda motor listrik, akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Barang Larangan (SPBL) dan atas barang tersebut ditegah.

Barang yang tidak ditetapkan SPBL dapat diajukan pengeluaran barang sebagian dengan mendapatkan pembebasan BM dan PDRI karena nilai barangnya USD 225 tidak melebihi batas maksimal ketentuan nilai barang per pengiriman yaitu FOB USD 500.

Selain itu juga akan mendapatkan pengecualian pemenuhan perizinan ketentuan pembatasan impor.

Sobat Pembelajar, sebagai penutup materi, berikut disampaikan hal-hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang dilakukan oleh sobat PMI ketika mengirim barang kiriman PMI

Do
(Harus dikerjakan oleh PMI)

1. PMI harus terdaftar di Kementerian P2MI atau Peduli Kemenlu. Agar PMI mengecek status pada Sisko Kementerian P2MI dan Portal Peduli WNI Kementerian Luar Negeri.
2. PMI yang belum tercatat pada Sisko Kementerian P2MI, perlu segera mendaftar ke portal https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri.
3. Pilih agen luar negeri yang tepat yaitu yang sudah ada Kerjasama dengan PJT/PT POS Indonesia. Yang tercantum di daftar list DJBC (akun instagram KPPBC Tanjung Mas Dan KPPBC Tanjung Perak)
4. Menyampaikan secara detil uraian jenis, jumlah dan harga barang ke ekspedisi.
5. Memperhatikan nilai barang yang dikirim tidak melebihi USD 500.
6. Tidak melebihi batas ketentuan jumlah pengiriman barang kiriman per 1 tahun.

Do
(Harus dikerjakan oleh PMI)

7. Pastikan ukuran kemasan barang kiriman sesuai ketentuan.
8. Mematuhi Ketentuan lartas yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga selain Kementerian Perdagangan.
9. Gunakan situs *tracking* agen/ekspedisi di luar negeri untuk mengetahui posisi barang kiriman mulai dari luar negeri tempat asal barang kiriman sampai masuk ke Indonesia.
10. Gunakan situs *tracking* DJBC (Info tracking di https://www.beacukai.go.id/barangkiriman) untuk mengetahui posisi barang kiriman di Indonesia mulai CN dikirim ke SKP (CEISA Barang Kiriman) sampai dengan pengeluaran barang.
11. Hubungi Bravo Bea Cukai 1500225 untuk mengetahui informasi mengenai ketentuan kepabeanan yang terkait dengan barang kiriman.

Don’t (Larangan)

1. Mengirim Barang Kena Cukai
2. Mengirim Barang Handphone, Komputer Genggam dan Tablet
3. Mengirim Barang Kendaraan Bermotor.
4. Mengirim Barang yang membahayakan Kesehatan, keamanan, dan moral masyarakat
5. Mengirim Barang berupa NPP (Narkotika, Prekursor dan Psikotropika)
6. Menerima titipan kiriman yang tidak jelas jenis barang dan asal-usulnya
7. Memberi tip/imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas Bea dan Cukai

Nah, itu tadi contoh-contoh penyelesaian studi kasus terkait barang kiriman PMI Tirta… Gimana udah lebih paham kan ya??
Iya nih Jane, Jadi intinya, barang kiriman dari PMI itu harus memenuhi syarat tertentu, kan? Seperti harus dikirim oleh PMI yang terdaftar di Kementerian P2MI/Peduli Kemenlu dan Barang Kirimannya harus memenuhi ketentuan jenis, jumlah dan frekuensi pengirimannya per tahun
Bener banget Tirta. Jadi, kesimpulannya, Sebelum kirim-kirim Barang, Para PMI harus selalu mengetahui ketentuan mengenai impor barang kiriman PMI, supaya lancar pengirimannya . . .
Setuju! Semoga materi studi kasus ini bermanfaat buat Sobat Pemelajar ya … sampai bertemu lagi di microlearning selanjutnya Sobat!!

KLC Admin
KLC:: Microlearning Barang Kiri
KLC::Kemenkeu Learning Center
klc2.kemenkeu.go.id/course/microlearning-barang-kiriman-pmi-137a277d/overview
KEMENKEU LEARNING CENTER
Cari pelatihan
Beranda
Pelatihan
Pusat Pengetahuan
Bantuan
Masuk
Beranda → Pelatihan → Microlearning Barang Kiriman PMI
MICROLEARNING BARANG KIRIMAN IMPOR PMI
Program Edukasi Masyarakat (PEM)
Microlearning Barang Kiriman PMI
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
Program Edukasi Masyarakat (PEM) Tentang Tata Laksana Impor Barang Pekerja Migran Indonesia merupakan program pembelajaran dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai untuk memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan dan cukai khususnya untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).
195
Peserta terdaftar
4.87
39 Ulasan
UNDANGAN
Informasi
Program Edukasi Masyarakat (PEM) Tentang Tata Laksana Impor Barang Pekerja Migran Indonesia merupakan program pembelajaran dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Pusdiklat Bea
28°C
Hujan ringan
Search
ENG
4:31
12/9